

# PERAN DAN FUNGSI PARA PIHAK DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DANAU TOBA DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS AEK NAULI

*(The Stakeholders's Role and Function in Ecotourism Development of The Lake Toba in  
Aek Nauli's Forest Area with Special Purposes Area)*

Sylviani<sup>2</sup>, Nunung Parlinah<sup>1</sup>, Deden Djaenudin<sup>2</sup>, Ane Dwi Septina<sup>2</sup>, Endang Karlina<sup>2</sup>, dan  
Bugi Kabul Sumirat<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,  
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Jawa Barat, Indonesia  
e-mail: nparlinah@gmail.com

<sup>2</sup>Badan Riset Inovasi Nasional, Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta, Indonesia  
e-mail: sylvireg@yahoo.com; dendja07@yahoo.com.au; anedwiseptina@gmail.com; bugisumirat@gmail.com

\*semua penulis merupakan kontributor utama

Diterima 18 Agustus 2022, direvisi 31 Oktober 2022, disetujui 13 April 2023

## ABSTRACT

*The development of the Aek Nauli's Forest Area with Special Purposes (KHDTK), as one of the national priority tourist sites in the Lake Toba catchment area, needs to be carried out in support of North Sumatra ecotourism. This study examines the roles and functions of the parties involved in ecotourism management's development. Primary data were obtained from the results of discussions, FGD, and filling out questionnaires by respondents determined purposively from both government and community groups. The analysis was carried out using the stakeholder analysis method to determine the parties' roles and functions. The study results indicate that the most interested and influential parties are KLHK, BP2LHK Aek Nauli, BBKSDA North Sumatra, and BOPDT. The Parties which have a low level of interest but have high influence are Bappenas, Kemenkomaritim, Kemenpar, Ministry of PUPR, Bappeda North Sumatra, and Bappeda Simalungun Regency. The Parties with a high level of interest but low influence are the surrounding community, such as Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), and cooperation (koperasi). The party that has a low level of interest and influence is PHRI. Coordination and communication are needed amongst the parties to carry out the national program in developing tourism priorities at KHDTK Aek Nauli correctly.*

*Keywords: KHDTK Aek Nauli, The National Priority Tourist Site, Ecotourism, Danau Toba Area.*

## ABSTRAK

Pengembangan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli, sebagai salah satu wisata prioritas nasional di daerah tangkapan air Danau Toba, perlu dilakukan untuk mendukung ekowisata Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan pengelolaan ekowisata. Penelitian dilakukan di kawasan KHDTK Aek Nauli sekitar Danau Toba. Data primer diperoleh dari hasil diskusi, FGD, dan pengisian kuisioner oleh responden yang ditentukan secara *purposive* baik dari kelompok pemerintah maupun masyarakat. Data sekunder diperoleh dari sumber data yang relevan baik di tingkat pusat maupun daerah. Analisa dilakukan dengan metode analisis *stakeholder* untuk mengetahui peran dan fungsi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi para pihak dalam pengelolaan ekowisata Danau Toba. Pihak yang sangat berkepentingan dan sangat berpengaruh adalah KLHK, BP2LHK Aek Nauli, BBKSDA Sumatera Utara, dan BOPDT. Pihak yang memiliki tingkat kepentingan rendah namun memiliki pengaruh yang tinggi adalah Bappenas, Kemenkomaritim, Kemenpar, Kementerian PUPR, Bappeda Sumatera Utara, dan Bappeda Kabupaten Simalungun. Pihak yang memiliki tingkat kepentingan tinggi namun pengaruh yang rendah adalah masyarakat sekitar seperti Kelompok Sadar Wisata, koperasi. Pihak yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah adalah PHRI. Koordinasi dan komunikasi para pihak

sangat diperlukan agar program nasional dalam pengembangan prioritas wisata di KHDTK Aek Nauli dapat terlaksana dengan baik.

Kata kunci: KHDTK Aek Nauli, wisata prioritas nasional, ekowisata, kawasan danau toba.

## I. PENDAHULUAN

Ekowisata merupakan salah satu bentuk wisata yang mendorong usaha pelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan, memadukan antara pelestarian lingkungan dengan pembangunan ekonomi, membuka lahan kerja baru bagi masyarakat setempat, serta memberikan pendidikan lingkungan terhadap wisatawan. Ekowisata juga harus memberikan dampak positif terhadap masyarakat berupa terbukanya lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat (Riadi, 2019, Fandeli dalam Ihsan, *et al* 2015, Dewi *et al* 2017). Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli merupakan salah satu destinasi wisata di kawasan wisata Danau Toba. Potensi keanekaragaman flora, fauna, dan hamparan lansekap merupakan objek wisata andalan dan sudah memiliki magnet tersendiri bagi para pengunjung. Peningkatan kunjungan dari waktu ke waktu menjadi salah satu indikator utama dalam penyusunan pengembangan ekowisata di KHDTK Aek Nauli. Selain potensi alami sebagai objek ekowisata, kondisi sosial budaya merupakan bagian potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek daya tarik wisata dalam pengembangan kawasan ekowisata.

Seperti yang dikemukakan oleh Rijal, S., Nasri, Ardiansyah, & Chairil (2020) bahwa pengembangan objek daya tarik wisata tidak hanya menampilkan kondisi alam tapi juga kondisi sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal akan memberikan hal yang berbeda dari objek wisata lainnya. KHDTK Aek Nauli memerlukan pengaturan secara khusus untuk menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan guna mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan wisata yang mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dibentuk untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan tersebut dengan masa tugas selama 25 tahun dan dapat diperpanjang (Wardani, Mentari Puspa & Nasution, 2016). Pengembangan ekowisata di KHDTK Aek Nauli membutuhkan peran aktif dan kerja sama para *stakeholder* serta mengoptimalkan dan mensinergiskan berbagai kepentingan pengelolaan kawasan hutan Aek Nauli. Dengan bersinergisnya *stakeholders* yang terlibat sesuai peran dan fungsi masing-masing, maka akan terjalin hubungan kerja sama yang baik dalam menjalankan program-program pengembangan ekowisata di Taman Nasional.

Pengembangan ekowisata di KHDTK Aek Nauli berbasis konservasi dilakukan dengan mengkolaborasikan antara potensi kawasan, mata pencaharian penduduk, serta kearifan lokal (Ardiansari & Saryani, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi para pihak dalam pengembangan KHDTK Aek Nauli; (2) mengkaji peran dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata KHDTK Aek Nauli di sekitar daerah tangkapan air Danau Toba. Implikasi dari kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu pedoman pengelolaan keberlanjutan kegiatan ekowisata khususnya di KHDTK Aek Nauli.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KHDTK Aek Nauli, Provinsi Sumatera Utara. Desa sekitar KHDTK Aek Nauli yang menjadi

sampel penelitian adalah Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Desa Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan. Pemilihan desa-desa tersebut merupakan prioritas nasional dalam pengembangan ekowisata.

## B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder berupa peraturan-peraturan, dan kebijakan yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam mengelola obyek wisata Danau Toba. Data primer diperoleh dari responden yang ditentukan secara *purposive* baik dari kelompok pemerintah maupun masyarakat. Para pihak di tingkat pusat yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekologi - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Para pihak di tingkat provinsi dan kabupaten yaitu Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli atau yang sekarang dikenal sebagai Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli (BPSILHK Aek Nauli), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba (BOPDT), LSM *Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation* (Vesswic), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Kabupaten Simalungun, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun, masyarakat sekitar (termasuk kelompok sadar wisata/ pokdarwis). Langkah-langkah yang dilakukan adalah identifikasi para pihak, mengelompokkan, dan membedakan antar para pihak berdasarkan peran dan fungsinya serta menganalisis hubungan antar para pihak berdasarkan hasil wawancara (Gambar 1).

## C. Analisis Data

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan para pihak yang berpengaruh dan berkepentingan dalam suatu kegiatan. Penilaian terhadap pemangku kepentingan dapat membantu dalam memutuskan sesuatu kegiatan, berkomunikasi dengan para pihak, dan dapat meminimalkan persepsi negatif, memperkuat persepsi positif, dan menyelesaikan konflik (Gregoire, 2022).

Ackermann & Eden dalam Bibin, Vitner, & Imran (2018), metode analisis pemangku kepentingan menggunakan matriks pengaruh dan klasifikasi pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi *key player*, *context setter*, *subject*, dan *crowd*. *Key player* adalah pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. *Context setter* adalah pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi, kepentingan rendah. *Subject* pemangku kepentingan pengaruh rendah, dan kepentingan tinggi. *Crowd* yaitu pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan

Tabel 1. Metode Pengumpulan Data  
Table 1. Data Collection Methods

No (Number)	Metode (Method)	Sumber data/Responden (Data Source/Informants)	Lokasi (Location)
1	Pencatatan	Instansi Pemerintah	Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa
2	Diskusi/konsultasi	Para pihak terkait	Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa
3	Wawancara/pengisian kuisisioner/FGD	Perwakilan kelompok Masyarakat sebanyak 42 responden	KHDTK

yang rendah. Adapun analisis para pihak dilaksanakan dengan cara (1) melakukan identifikasi para pihak, (2) mengelompokkan dan membedakan antar para pihak, dan (3) menyelidiki hubungan antar para pihak.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengembangan ekowisata di KHDTK Aek Nauli antara lain meliputi kamp konservasi gajah (ANECC), kamping *groundareal* perkemahan, dan air terjun sebagai zona wisata kawasan wisata Danau Toba. KHDTK Aek Nauli sebenarnya memiliki cakupan pada pengembangan wisata alam serta pengembangan kerajinan berbahan dasar bambu. Secara lebih rinci, potensi pengembangan wisata alam dapat dikembangkan di Desa Sibaganding adalah Batu Gantung, Huta Sibatu Loting Parherekan, Batu Lubang, dan Batu Gorgo. Sementara untuk Desa Pondok Buluh di proyeksikan pada pembangunan desa bambu dan berbagai kerajinan berbahan baku bambu.

Program pengembangan ekowisata membutuhkan kerja sama dan peran aktif para pihak secara nyata di lapangan. Sinergitas dan optimalisasi peran para pihak yang berkepentingan sangat diperlukan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil kajian analisis *stakeholder* bahwa para pihak mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas dalam pengembangan kawasan ekowisata secara berkelanjutan.

#### A. Identifikasi Para Pihak

Secara sederhana, para pihak dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan ekowisata. Para pihak menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan organisasi karena mereka memiliki peran, baik peran aktif maupun pasif (tidak terlibat langsung dalam teknis pengelolaan dilokasi). Pelaksanaan pengelolaan ekowisata tentunya tidak dapat terlaksana apabila para pihak yang terlibat tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan mengembangkannya. Kemampuan dalam menjaga daya dukung kawasan, kemampuan dalam melibatkan masyarakat setempat untuk berperan aktif melestarikan lingkungannya. Dengan banyaknya kepentingan yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat, maka diperlukan kerja sama yang kuat antara mereka (Pamungkas G., 2013). Kepentingan para pihak berbeda baik pihak pusat maupun daerah, namun kerja sama harus terjalin dengan baik sesuai tupoksinya.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa para pihak berasal dari unsur instansi pemerintahan (*government*), masyarakat (*community*), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta (*business*). Adapun para pihak di tingkat pusat dan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.



Sumber (Source): Data Primer (Primary data)

Gambar 1. Diskusi dan wawancara dengan para pihak  
 Figure 1. Discussion and interview with the parties

Tabel 2. Para Pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Ekowisata Danau Toba  
*Table 2. The Parties that involve in Danau Toba's Ecotourism Development*

Para pihak pusat (Centre Stakeholder)	Para pihak daerah (Regional Stakeholder)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Nasional</li> <li>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>• Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman</li> <li>• Kementerian Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli atau yang sekarang dikenal sebagai Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli (BPSILHK Aek Nauli).</li> <li>• Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSA) Sumatera Utara</li> <li>• Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba (BOPDT)</li> <li>• Bappeda Provinsi Sumatera Utara</li> <li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara</li> <li>• Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara</li> <li>• Bappeda Kabupaten Simalungun</li> <li>• Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun</li> <li>• Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).</li> <li>• Kelompok masyarakat sadar wisata (pokdarwis)</li> <li>• Vesswic</li> </ul>

Sumber : Hasil Identifikasi data sekunder setelah diolah  
 Source: Secondary data result identification after proceed

Tabel 2 menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga-lembaga baik pusat maupun daerah sangat banyak, sehingga perlu adanya koordinasi dan jejaring kemitraan di antara para pihak untuk mencapai pengembangan ekowisata yang maksimal. Hubungan kerja sama yang baik akan memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan terbukanya kesempatan kerja dan mendukung keberhasilan dalam menjalankan program-program pengembangan ekowisata.

Menurut Nugroho dalam Handayani (2017) menyatakan bahwa peran para pihak dalam program pengembangan ekowisata meliputi (1) pembuat kebijakan (*policy creator*), (2) koordinator, (3) fasilitator, (4) pelaksanan kegiatan (*implementer*). Pemerintah pusat berperan sebagai *policy creator* yang membuat peraturan tentang pengembangan potensi wisata di daerah. Bappeda provinsi dan BOPDT berperan sebagai koordinator yang melakukan koordinasi dengan dengan pihak lain yang terkait dalam merencanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang

dilakukan dalam pengembangan ekowisata. BP2LHK Aek Nauli sekarang dikenal sebagai BPSILHK Aek Nauli, BBKSDA, dan Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator dalam hal penyiapan lahan dan kawasan sebagai obyek wisata edukasi, penyebaran informasi tentang jenis wisata yang tersedia serta melakukan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan tentang ekowisata. Dinas Kehutanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan sebagai implementator yaitu melakukan pemberdayaan terhadap kelompok sadar wisata (pokdarwis) dalam pengembangan, pelestarian lingkungan pariwisata. Masyarakat lokal berperan aktif dalam pengembangan ekowisata yang merupakan pariwisata bersifat massal. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak tersisihkan (keberadaan, budaya, karakteristik, ataupun mata pencahariannya), dengan demikian masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengembangan ekowisata tersebut (Ridwan, 2017).

Pembelajaran dalam merekomendasikan koordinasi sebaiknya dilakukan lebih intensif antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekowisata dan kepentingan utama, partisipasi pemerintah, dan masyarakat setempat (Kennedy, Magio, Monica, Maria, & Carlos, 2013).

### B. Peran dan Fungsi Para Pihak

Para pihak adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan (Kadir, Awang, & Purwanto, R.H. Poedjirahajoe, 2013).

Para pihak sebagaimana hasil identifikasi baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah mempunyai tugas dan peran yang berbeda, juga memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang bervariasi (Diagram 1). Ada para pihak yang mempunyai kepentingan tinggi namun tidak berpengaruh dalam pengelolaan ekowisata Danau Toba. Begitu juga ada para pihak yang tidak berkepentingan namun sangat berpengaruh untuk keberlangsungan program pengembangan ekowisata. Dengan mengidentifikasi dan menilai pengaruh dan

pentingnya aktor kunci, baik dalam kelompok atau organisasi, yang secara signifikan dapat memengaruhi keberhasilan rencana pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba (Mahadiansar, Wijaya, & Wanto, 2021).

Berdasarkan data primer, para pihak yang telah teridentifikasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### (a) *Key players*

*Key players* adalah para pihak yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap keberadaan KHDTK Aek Nauli sebagai lokasi ekowisata ilmiah. Pihak pemerintah pusat yang sangat berpengaruh dan sangat berkepentingan adalah KLHK. Karena rencana pengembangan ekowisata bersifat ilmiah berada di kawasan hutan lindung dan KHDTK Aek Nauli. Pihak pemerintah daerah yang sangat berkepentingan dan sangat berpengaruh adalah BP2LHK Aek Nauli sekarang dikenal sebagai BPSILHK Aek Nauli, BBKSDA Sumatera Utara, dan BOPDT. Dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang sangat tinggi, maka para pihak tersebut harus diikutsertakan dalam setiap tahapan kegiatan baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun antar



Diagram 1. Pengaruh dan Kepentingan para pihak dalam pengelolaan Danau Toba  
 Diagrame 1. The Parties' Influence and interest in Toba Lake Ecotourism development

para pihak. BP2LHK Aek Nauli sekarang dikenal sebagai BPSILHK Aek Nauli memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi sebagai pengelola dari KHDTK Aek Nauli. BBKSDA memiliki kepentingan terhadap keberadaan ANECC yang berlokasi di KHDTK Aek Nauli, sedangkan BOPDT memiliki pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan wisata di kawasan Danau Toba.

(b) *Context setter*

*Context setter* adalah para pihak yang memiliki tingkat kepentingan rendah namun memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keberadaan KHDTK Aek Nauli sebagai lokasi ekowisata ilmiah. Para pihak yang termasuk dalam kelompok ini adalah Bappenas, Kemenkomaritim, Kemenpar, Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan Bappeda Kabupaten Simalungun. Pengaruh Bappenas dalam pengembangan ekowisata tinggi karena instansi ini penentu dan koordinator dalam pelaksanaan program prioritas nasional. Para pihak lainnya berfungsi sebagai pengawas terhadap unit-unit kerja di daerah, dan menyiapkan program-program yang berkaitan dengan peningkatan pariwisata di daerah, penyediaan infrastruktur, dan lain sebagainya.

(c) *Subjects*

Para pihak yang termasuk dalam kelompok ini adalah masyarakat sekitar (termasuk pokdarwis), Koperasi Karyawan BPSILHK Aek Nauli, mempunyai peran juga sebagai wadah forum kelompok pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun, dimana dinas-dinas pariwisata daerah ini bertugas dan berfungsi sebagai pengelola pemasaran, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan Veswicc.

Masyarakat lokal harus mengetahui potensi dampak pengembangan ekowisata di daerahnya, pihak pemangku kepentingan di sektor industri harus memberikan suasana

yang kondusif, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang ekowisata perlu ditingkatkan. (Ojong, Eja, Undelikwo, & Agbor, 2013).

Para pihak dalam kelompok ini adalah pihak yang memiliki tingkat kepentingan tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah terhadap keberadaan KHDTK Aek Nauli sebagai lokasi ekowisata ilmiah. Para pihak dari unsur masyarakat terutama tokoh masyarakat dan ketua adat serta kelompok sadar wisata (pokdarwis) sangat berkepentingan dalam pengembangan ekowisata KHDTK Aek Nauli, karena dapat membantu perekonomian masyarakat secara tidak langsung. Masyarakat atau pokdarwis berkepentingan dalam pengembangan ekowisata Aek Nauli terutama dapat membantu penyediaan obyek wisata seperti menyediakan tempat kuliner, souvenir, dan sebagai *guide* bagi para wisatawan atau tempat pelatihan membuat kerajinan bagi pengunjung. Tokoh masyarakat dan ketua adat sangat berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat dalam ikut serta mengembangkan obyek wisata sebagai mediator atau fasilitator. Sementara itu unit kerja daerah seperti dinas pariwisata juga kepentingannya sangat tinggi dan mempunyai kewenangan dalam peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan pemberdayaan dalam peningkatan keterampilan.

(d) *Crowds*

Para pihak yang termasuk dalam kelompok ini adalah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Mereka memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap keberadaan KHDTK Aek Nauli sebagai lokasi ekowisata ilmiah. Unsur swasta ini memiliki pengaruh dan kepentingannya rendah karena perlu biaya yang cukup besar jika ingin ikut serta dalam pengembangan ekowisata ini.

Diagram pengaruh dan kepentingan yang tergambar digunakan untuk memperjelas posisi para pihak dalam pengelolaan

ekowisata KHDTK Aek Nauli. Berdasarkan Reed dalam Octavia, S. & Saharuddin (2013) menyatakan bahwa kepentingan merujuk pada kebutuhan para pihak dalam pencapaian *output* dan tujuan, sementara pengaruh merujuk pada pengaruh yang dimiliki para pihak untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan.

### C. Koordinasi Para Pihak

Hubungan antar para pihak menunjukkan alur hubungan baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun yang terlaksana di lapangan. Dengan terjalinnya hubungan antar para pihak dimaksudkan untuk membentuk suatu kesepakatan dan kesepahaman tentang konsep pengembangan ekowisata di KHDTK Aek Nauli (Widiyanti, Soekmadi, & Santoso, 2015). Ostrom dalam Gunawan, Hidayat, & Anggraini, (2018) menyatakan bahwa analisis hubungan antar aktor dalam sistem kelembagaan, ada tiga tingkatan (level), yaitu pertama, level konstitusi (*constitutional*), merupakan lembaga yang berperan dalam menyusun aturan main, yaitu KLHK (KHDTK Aek Nauli meskipun bukan sebagai lembaga namun merupakan perwakilan KLHK di daerah, dan juga BKSDA Sumut), dan BOPDT. Kedua, level pilihan kolektif (*collective choice*), yaitu lembaga yang berperan dalam menyusun peraturan untuk dilaksanakan oleh lembaga operasional. Dalam hal ini Bappenas, Kemenkomaritim, Kemenpar, Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan Bappeda Kabupaten. Ketiga, lembaga operasional (*operational agency*), yaitu lembaga yang secara langsung melaksanakan kebijakan di lapangan, antara lain Dinas Pariwisata, pokdarwis, Dinas Kehutanan, dan LSM. Strategi perilaku/aktor dalam mengembangkan pariwisata berbasis pembangunan berkelanjutan adalah kerja sama antar lembaga dan peningkatan partisipasi masyarakat, pendistribusian sumber daya serta komunikasi dan koordinasi (Lestari, Suwitri, Larasati, & Warsono, 2020).

Menurut Sekartjajarini dalam Widodo *et al.* (2018) bahwa hubungan antar para pihak dikelompokkan menjadi hubungan kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang memenuhi 5 (lima) komponen kriteria dan indikator ekowisata yaitu konservasi, partisipasi, edukasi rekreasi, ekonomi, dan kendali.

Kerja sama dapat dilakukan apabila masing-masing lembaga atau kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan ekowisata di sekitar Danau Toba sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan katagori dan pengelompokkan para pihak, dimana para pihak pusat merupakan pengarah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan mensinkronkan dengan kebijakan daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan ekowisata kawasan Danau Toba. Sebagai para pihak pelaksana kebijakan di daerah juga mempunyai kewenangan untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap masyarakat yang berdampak dan berpengaruh langsung terhadap keberadaan pariwisata Danau Toba.

Koordinasi dan komunikasi juga perlu dilakukan antara para pihak dalam hal teknis pemanfaatan kawasan. Komponen indikator keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata antara lain, terjaganya aspek konservasi yang terhindar dari pencemaran. Selain itu keberlanjutan objek ekowisata harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung di kawasan ekowisata makin sedikit (Erwiantono, Susilo, Aditya, Saleha, & Budiayu, 2016).

Komunikasi dalam pengembangan ekowisata KHDTK Aek Nauli sangat diperlukan terutama dengan pihak pengelola. Bagaimana pengunjung mendapatkan informasi tentang obyek wisata yang ada misalnya melalui media elektronik dan media lainnya. Hubungan antar para pihak terjadi pada hampir seluruh tahapan kegiatan



pengembangan ekowisata. Mulai dari inventarisasi dan identifikasi obyek daya tarik wisata, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan program ekowisata. Dengan terjalinnya hubungan antar para pihak dimaksudkan untuk membentuk suatu kesepakatan dan kesepahaman tentang konsep pengembangan ekowisata di kawasan KHDTK Aek Nauli.

Adapun sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing para pihak terkait wisata Danau Toba dan ekowisata di KHDTK Aek Nauli seperti tersaji pada Tabel 3. Sumber daya meliputi kewenangan, pengetahuan mengenai kebijakan, informasi khususnya kepariwisataan, dan teknologi antara lain IT, berbagai hasil penelitian sumber daya alam, kesehatan/perilaku gajah, kepariwisataan.

Peran dan kolaborasi para pihak sangat penting dalam pengembangan pariwisata karena ketika para pihak dapat menjalankan peran masing-masing secara efektif dan kolaboratif maka akan memberi dampak yang maksimal kepada kemajuan pariwisata di tempat tersebut. Peran serta masyarakat dapat terwujud karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan usaha jasa wisata yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Terdapat lima belas pihak terlibat dalam pengelolaan ekowisata Danau Toba, yaitu empat dari pusat dan sebelas dari daerah yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang bervariasi terhadap pengelolaan ekowisata Danau Toba. Para pihak tersebut berperan sebagai *key player*, *context setter*, *subjects*, dan *crowds*. Para pihak yang sangat berkepentingan dan sangat berpengaruh adalah Kementerian LHK, BP2LHK Aek Nauli sekarang dikenal sebagai BPSILHK Aek Nauli, BBKSDA Sumatera Utara, dan BOPDT. Mereka ikut serta dalam setiap tahapan kegiatan baik yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun antar para pihak. Sementara itu pihak yang kepentingannya rendah tapi pengaruh tinggi adalah Bappenas, Kemenkomaritim, Kemenpar, Kementerian PUPR, Bappeda Sumatera Utara, dan Bappeda Kabupaten. Koordinasi dan komunikasi diperlukan antar para pihak agar program nasional dalam pengembangan prioritas wisata di Danau Toba dapat terlaksana dengan baik.

### B. Rekomendasi

Pengembangan ekowisata hendaknya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan

Tabel 3. Sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing para pihak terkait wisata Danau Toba dan ekowisata di KHDTK Aek Nauli

Table 3. *The Resources owned by each party related to Danau Toba Tourism Site and Ecotourism in Aek Nauli's KHDTK*

Jenis Sumber Daya (Resources Type)	Pemilik Sumber Daya (Para pihak) (Resources Institutions)
Kewenangan	Bappenas, Kemenkomar, Kemenpar, KLHK, BP2LHK Aek Nauli sekarang dikenal sebagai BPSILHK Aek Nauli, BOPDT
Pengetahuan tentang kebijakan	Bappenas, Kemenkomar, Kemenpar, KLHK, BP2LHK Aek Nauli, BOPDT, BBKSDA Sumut, Bappeda Prov/Kab, Dinas Pariwisata Prov/Kab, Dinas Kehutanan Prov
Informasi (khususnya pariwisata)	Bappenas, Kemenkomar, Kemenpar, KLHK, BP2LHK Aek Nauli, BOPDT, BBKSDA Sumut, Bappeda Prov/Kab, Dinas Pariwisata Prov/Kab, Dinas Kehutanan Prov, Veswicc, Koperasi dan Masyarakat (kalangan terbatas)
Teknologi	Kemenpar, KLHK, BP2LHK Aek Nauli, BOPDT, BBKSDA Sumut, Dinas Pariwisata Prov/Kab, Veswicc

berbagai *stakeholder* terkait termasuk organisasi yang ada di masyarakat. Tokoh masyarakat dapat dijadikan sebagai *entry point* untuk dapat bekerja sama.

## UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam kegiatan pengumpulan data ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bibin, M., Vitner, Y., & Imran, Z. (2018). Analysis of stakeholders in the development of Labombo Beach sustainable town in Palopo City. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 31(1), 62–71.
- Erwiantono, Susilo, H., Aditya, A., Saleha, Q., & Budiayu, A. (2016). Kebijakan Nilai Manfaat Ekonomi dan Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Kawasan Labuan Cermin Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan*, 6(1), 49–65.
- Gregoire, P. (2022). Stakeholder Analysis: Definitions, Tools, and Techniques. Retrieved March 7, 2022, from <https://www.boreal-is.com/blog/what-is-stakeholder-analysis/>
- Gunawan, A., Hidayat, E., & Anggraini, A. (2018). Analisis kelembagaan rehabilitasi mangrove di Karangsong Indramayu Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(1), 1–7.
- Ihsan, Soegiyanto, H., & Partoso, H. (2015). Pengembangan potensi ekowisata di Kabupaten Bima. *Jurnal GeoEco*, 1(2), 195 – 206.
- Kadir, A. W., Awang, S. A., & Purwanto, R.H. Poedjirahajoe, E. (2013). Analisis stakeholder pengelolaan taman nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20(1), 11–21.
- Kennedy, Magio, O., Monica, V. V., Maria, A. S. N., & Carlos, A. R. G. (2013). Ecotourism in developing countries: A critical analysis of the promise, the reality, and the future. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 4(5), 481–486.
- Lestari, A. W., Suwitri, S., Larasati, E., & Warsono, H. (2020). Actor-network in tourism management based on sustainable development (Case study of tourism development in Batu City, Indonesia). *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(13), 8–15. doi://10.26661/2522-1566/2020-3/13-01.
- Mahadiansar, Wijaya, A., & Wanto, A. H. (2021). Stakeholder Analysis in Tourism Development of the Bintan Regency during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3), 220–234. doi://10.18196/jgpp.v8i3.11758.
- Octavia, S., & Saharuddin. (2013). Hubungan peran stakeholders dengan partisipasi masyarakat dalam program agropolitan desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 01(03), 231–246.
- Ojong, F. E., Eja, E. I., Undelikwo, V. A., & Agbor, E. A. (2013). Indigenous peoples' perception of ecotourism in Cross River State, Nigeria. *Academic Research International Part-I: Social Sciences and Humanities*, 4(1), 275–281. Retrieved from <http://www.journals.savap.org.pk/>
- Pamungkas G. (2013). Ekowisata belum milik bersama: kapasitas jejaring stakeholder dalam pengelolaan ekowisata (Studi kasus: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 24(1), 49 – 64.
- Riadi, M. (2019). Ecowisata (Pengertian, Prinsip, Karakteristik, dan Jenis). Retrieved December 31, 2021, from <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/ekowisata-pengertian-prinsip-karakteristik-dan-jenis.html>
- Wardani, Mentari Puspa, & Nasution, N. A. (2016). Kontribusi pengembangan pariwisata danau Toba melalui skema BOP (Badan Otorita Pariwisata) bagi masyarakat di sekitar danau Toba. Retrieved December 31, 2021, from [https://www.researchgate.net/publication/311451871\\_](https://www.researchgate.net/publication/311451871_)
- Widiyanti, H., Soekmadi, R., & Santoso, N. (2015). Strategi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam pengembangan ekowisata di taman wisata alam kawah Ijen. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 2(3), 202–213.
- Handayani F, Warsono. H. (2017). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata pantai karang jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6 (3) doi://10.14710/Jppmr.V6i3.16543.
- Ridwan.M A, Muchsin. S, Hayat. (2017) Model pengembangan ekowisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2) (2017) 141-158 <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>.